

Evaluasi Kritis Kinerja IMF dalam Krisis Asia

Agus Widarjono

The IMF established after World War II is a part of world society's effort to save the world from economic depression. Initially, it had well-defined purposes. With the collapse of fixed exchange rate system in 1971, the IMF lost its original purposes. The institution then brings free market ideology. Fiscal Austerity, privatization and market liberalization are the three pillars of Washington Consensus advice to help countries facing economic problem. Washington Consensus, however, was designed originally to respond economic problem in Latin America where those countries have huge deficit and loose monetary policy. It is not surprise that these recipes cannot run well in the case of the East Asia Crisis. Indeed, the IMF's advice worsened the economic crisis of the regions and spread to other regions

Indonesia merupakan pasien IMF yang masih tersisa setelah lembaga internasional tersebut membantu negara-negara Asia Timur yang mengalami krisis ekonomi yang dipicu oleh krisis mata uang dikawasan ini sejak tahun 1997. Sudah hampir 6 tahun keberadaan IMF di Indonesia, namun resep-resep pemulihan ekonomi (*structural adjustment*) belum memberikan hasil yang optimal, sangat minimalis hasilnya, bahkan boleh dibilang telah gagal. Pro dan kontra pun terjadi di kalangan pejabat pemerintahan maupun ekohom atas keberadaan IMF. Bangsa ini kemudian telah membuat keputusan bahwa kerjasama pemulihan ekonomi dengan IMF akan diakhiri bulan November 2003 ini setelah mengalami masa perpanjangan satu tahun.

Negara Korsel dan Thailand yang dengan cepat mengakhiri kontrak dengan IMF, proses pemulihan ekonomi ternyata lebih akseleratif. Negara Malaysia yang dengan tegas menolak kehadiran IMF justru

mampu keluar dari krisis dengan segera. Di tingkat global pun juga terjadi ketidakpercayaan terhadap IMF dalam menangani kasus krisis ekonomi di negara-negara sedang berkembang. Kasus negara Argentina misalnya, yang telah menjadi pasien IMF sejak tahun 1980-an kembali terkena krisis pada akhir tahun 2001¹. Begitu pula program-program reformasi struktural yang telah dilakukan oleh IMF dan Bank Dunia di negara-negara kawasan Afrika sejak tahun 1980-an juga belum mampu mengangkat negara miskin di kawasan tersebut.² Negara-negara blok timur yang telah mentransformasi ekonominya dari ekonomi komando menjadi ekonomi pasar dengan bantuan IMF

¹ Arthur MacEwan (2001). The IMF and Argentina's Spiraling Crisis. <http://www.foreignpolicy-infocus.org/>

² Sadaharu Kataoka (1999) The Plight of African States and Good Government, *the Japan Institute of International Affairs*

juga belum mampu juga menunjukkan kinerja yang menggembirakan.

Berbagai fakta ini menunjukkan bahwa resep-resep IMF yang dikenal dengan tiga pilar konsensus Washington yaitu kebijakan fiskal yang ketat (*fiscal austerity*), liberalisasi pasar (*market liberalization*) dan privatisasi (*privatization*) sebagai obat mujarab dari IMF diragukan keampuhannya³. Tulisan ini akan mencoba mengevaluasi secara kritis resep-resep pemulihan ekonomi yang disodorkan oleh IMF dalam mengatasi krisis ekonomi di kawasan Asia.

Visi IMF

Krisis ekonomi (*great depression*) tahun 1930-an dan perang dunia II telah memberi pelajaran kepada dunia perlunya tata ekonomi dunia yang stabil untuk mendukung pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Dibentuklah dua lembaga dunia yakni *International Monetary Fund* (IMF) dan Bank Dunia (*world bank*) pada konferensi perserikatan bangsa-bangsa yang membidangi masalah moneter dan finansial di Bretton Woods, New Hampshire, AS pada bulan Juli 1944.

Mulanya pembentukan dua lembaga tersebut merupakan bagian dari upaya untuk membantu pembangunan kembali Eropa setelah kehancurannya paska perang dunia II. Dua lembaga ini mempunyai tugas yang berbeda. *World Bank* atau dikenal sebagai *The International Bank for Reconstruction and Development* (IBRD) lebih menekankan pada masalah pembangunan ekonomi suatu negara. Sementara itu IMF menekankan pada masalah moneter. Lembaga ini akan membantu negara-negara anggotanya yang mengalami kesulitan keseimbangan eksternalnya (*external balance shock*) yang tercerminkan dalam ketidakseimbangan neraca pembayaran (*Balance of Payment*)⁴.

Dalam operasinya, IMF memperoleh dana dari para anggotanya. Besarnya kontribusi setiap anggota kemudian akan menentukan hak suara anggota dalam pengambilan keputusan di lembaga ini dan besarnya bantuan yang diterima. Untuk membantu negara-negara anggota, IMF mencetak uang yang dikenal dengan *Special Drawing Right* (SDR) yang terdiri dari 5 sekeranjang mata uang kuat dunia yaitu dollar AS, Mark Jerman, Yen Jepang, Franc Perancis dan Pound Inggris. IMF menyediakan bantuan keuangan kepada para anggotanya dalam berbagai bentuk fasilitas sesuai dengan tingkat masalah neraca pembayaran yang dihadapi para anggotanya. Tujuan bantuan dana ini untuk memupuk cadangan devisa, menstabilkan nilai tukar dan membayar impor tanpa harus melakukan kebijakan pembatasan perdagangan (*trade restriction*) maupun kontrol modal (*capital control*).⁵

Paling tidak sudah ada delapan fasilitas yang pernah disediakan IMF kepada para anggotanya.⁶ Pertama adalah *Stand-by-arrangement* (SBA). Fasilitas ini diberikan jika negara anggota mengalami persoalan neraca pembayaran jangka pendek. Masa pengembalian dana antara 3-5 tahun. Kedua, jika persoalan neraca pembayaran bersifat sistemik maka IMF akan memberikan dalam bentuk *Extended Fund Facility* (EFF) dengan pengembalian dana dalam kurun waktu 4,5–10 tahun. Fasilitas ketiga yaitu *Supplemental Reserve Facility* (SRF) diberikan ketika negara anggota mengalami masalah finansial karena adanya pelarian modal dalam jumlah besar-

³ Joseph E. Stiglitz (2002). *Globalization and its Discontent*. New York: W.W. Norton.

⁴ <http://www.imf.org/>

⁵ *ibid.* <http://www.imf.org/>

besaran (*massive outflows of capital*) dengan masa pengembalian 2-2,5 tahun.

Fasilitas keempat berupa *Contingent Credit Lines* (CCL) yang ditujukan untuk mendukung kebijakan ekonomi (*sound economic policies*) agar tidak terkena imbas krisis dari negara lain (*financial contagion*). Berikutnya adalah fasilitas *Compensatory Financing Facility* (CCF). Fasilitas ini diberikan untuk membantu negara anggotanya yang mengalami penurunan ekspor maupun kenaikan impor yang disebabkan oleh fluktuasi harga. Fasilitas terakhir yang pernah diberikan IMF adalah *Emergency Assistance* berupa bantuan karena negara anggotanya mengalami bencana alam maupun konflik.

Disamping itu khusus negara-negara sedang berkembang yang miskin diberikan fasilitas berupa *Poverty Reduction and Growth Facility* (PRGF) dan *Heavily Indebted Poor Countries* (HIPC). Fasilitas PRGF bertujuan untuk memperbaiki neraca pembayaran, memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan standar hidup penduduk miskin. Sementara itu, fasilitas HIPC hanya diberikan kepada negara-negara miskin yang mengalami krisis utang luar negerinya. Dengan fasilitas ini negara miskin diberi keringanan utang berupa penghapusan utang luar negeri mereka (*debt reduction*).

Pada awal-mulanya pemberian dana bantuan IMF kepada para anggotanya tidak memerlukan prasyarat apa apa. Tetapi mulai tahun 1952, IMF memberikan prasyarat (*conditionality*) bagi negara penerima untuk mengikuti langkah-langkah kebijakan-kebijakan ekonomi dari IMF agar negara penerima mampu mengatasi problem neraca pembayaran dan mampu membayar kembali dalam kurun waktu 3 - 5 tahun. *Conditionality* ini baru secara eksplisit dimasukkan sebagai syarat pemberian dana

pada tgl 20 september 1968. Sebelum itu, syarat dalam *conditionality* masih belum jelas aturannya.⁷

Sampai dengan pertengahan 1970-an, kebijakan-kebijakan ekonomi yang harus dilakukan oleh negara penerima bantuan dana terkait erat dengan persoalan tingkat dan komposisi permintaan agregat. Kelebihan permintaan merupakan faktor penyebab utama penyakit inflasi, terlalu mahal mata uang (*currency overvaluation*) dan akhirnya menimbulkan persoalan pada neraca pembayaran. Pendekatan yang diambil oleh IMF mengatasi masalah permintaan agregat adalah pendekatan monetaris yaitu dengan cara mengontrol jumlah uang beredar, mengurangi defisit anggaran pemerintah, devaluasi, deregulasi harga, pengurangan subsidi dan penghapusan hambatan tarif maupun non tarif.⁸

Dari Keynesian ke NeoKlasik

Bila ditelusuri sejarahnya, ide pembentukan IMF didasarkan pada idiologi bahwa pasar seringkali gagal menjalankan fungsi sebagaimana mestinya (*market failure*). Berangkat dari hal ini, IMF mengeluarkan resep pemulihan ekonomi didasarkan pada arus pemikiran ekonomi Keynesian. IMF mendukung setiap negara untuk menggunakan sistem nilai tukar tetap. Namun resep-resep IMF dari waktu ke waktu mengalami perubahan dan semakin menjauhi model pemulihan ala Keynesian. Hal ini terjadi setelah jatuhnya nilai tukar tetap seiring dengan gagalnya sistem nilai

⁶ ibid. <http://www.imf.org/>

⁷ Schott R. Sidell. Brief History of Fund Conditionality. <http://www.imf.org/>

⁸ ibid. Schott R. Sidell. <http://www.imf.org/>

tukar ala *Bretton Woods* pada tahun 1971⁹. Mulai tahun 1980 resep-resep yang disodorkan kepada negara yang mengalami guncangan eksternal berubah total lebih mengarah kepada idiologi pasar bebas.¹⁰

Perubahan resep-resep ini tidak terlepas dari ketidakdemokratisan ditubuh IMF¹¹. Mekanisme pengambilan keputusan ditubuh lembaga ini tidak didasarkan pada prinsip satu negara satu suara (*one man one vote*) tetapi lebih didasarkan pada kontribusi dana yang disetorkan oleh setiap anggotanya. Negara-negara maju yang tergolong dalam kelompok G-7 cukup dominan suaranya di IMF: AS (19,1%), Inggris (6,6%), Jerman (5,7%), Perancis (4,8%), Jepang (4,5%) dan Kanada (3,1%). Total suara negara maju bila dijumlah sebesar 57,6%, sedangkan gabungan seluruh hak-hak negara-negara sedang berkembang hanya 34,4%¹².

Dengan adanya ketimpangan suara ini maka tidaklah mengherankan jika ide-ide pemulihan ekonomi yang tertuang dalam *conditionality* dalam bentuk *structural adjustment* sejalan dengan keinginan negara-negara kapitalis maju yang lebih menekankan pada idiologi pasar bebas. Dalam konteks ini peran AS dalam setiap keputusan cukup signifikan. Setiap persetujuan keputusan penting di IMF menurut aturan harus memenuhi ketentuan minimal 85% suara dari anggotanya, maka suara AS sebesar 19,1% akan mampu menjadikan AS sebagai penentu dalam setiap keputusan IMF. Artinya setiap keputusan di IMF harus membawa misi kepentingan AS yakni misi yang dicanangkan oleh Departemen keuangan AS.

Conditionality dalam bentuk *structural adjustment* ini harus dilakukan kepada para anggotanya yang menerima bantuan dana dari IMF. Paket dalam *Structural adjustment*

yang dikenal dengan Konsensus Washington ini meliputi empat hal yaitu: (1) pembenahan struktur ekonomi makro; (2) liberalisasi dan optimalisasi mekanisme pasar; (3) pembenahan kebijakan moneter; (4) pembenahan sektor fiskal dan finansial. Untuk mencapai empat sasaran tersebut maka negara penerima harus melakukan hal-hal sebagai berikut: (1) pengurangan pengeluaran pemerintah, defisit anggaran dan utang luar negeri; (2) pengurangan tingkat pertumbuhan uang untuk mengontrol inflasi; (3) mengurangi peran monopoli pemerintah di pasar atau privatisasi; (4) deregulasi sektor industri dan perbankan; (5) perubahan pemberian kredit dari publik ke sektor swasta; (6) mengurangi kontrol pemerintah terhadap upah, harga suku bunga dan pengurangan subsidi; (7) menaikkan suku bunga; (8) penghapusan hambatan untuk ekspor; (9) penurunan tarif, penghapusan kuota dan menghentikan kontrol devisa dan kontrol nilai tukar; (10) menjaga cadangan devisa dalam jumlah yang aman; (11) melakukan devaluasi.¹³

Konsensus Washington yang saat ini menjadi acuan dalam mengatasi krisis ekonomi di suatu negara pada mulanya didisain untuk mengatasi krisis ekonomi yang terjadi di kawasan Amerika Latin. Negara-negara latin saat itu mengalami persoalan tingginya defisit anggaran pemerintah dan kebijakan moneter yang

⁹ Anna J. Schwartz (1998). *Time to Terminate The ESF and The IMF*, Working Paper No. 48. *National Bureau of Economic Research* (NBER), hal 6

¹⁰ *ibid.* Joseph E. Siglitz (2002). hal 12

¹¹ *ibid.* Anna J. Schwartz (1998). hal 1

¹² Agus Subagyo (2003). *Restrukturisasi Ekonomi dan Birokrasi: Kebijakan atas Krisis dalam Tinjauan Moneter Internasional*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, hal 33.

¹³ <http://www.imf.org/>

terlalu longgar sehingga menyebabkan tingginya tingkat inflasi. Selanjutnya inflasi ini akan menyebabkan mata uang mengalami *overvalue* sehingga berakibat pada persoalan neraca pembayaran. Oleh karena itu, IMF menganjurkan agar melakukan kebijakan fiskal ketat (*balance budgets*) dan kebijakan moneter ketat sebagai prasyarat untuk menerima bantuan.¹⁴

Munculnya globalisasi ekonomi dunia yang dipelopori oleh Amerika dan Inggris sejak dekade 1980-an, maka lembaga-lembaga dunia seperti IMF dan Bank Dunia kemudian menjadi lembaga misioner sistem pasar bebas yang memaksakan negara-negara dunia ketiga untuk membuka akses pasar mereka baik pasar sektor riil maupun finansial. Tiga pilar konsensus washington merupakan konspirasi antara IMF, Bank Dunia dan Departemen keuangan AS dijadikan acuan bagi IMF dan Bank Dunia sebagai prasyarat didalam membantu negara-negara sedang berkembang.¹⁵

Keajaiban Asia Timur

Sebelum krisis ekonomi tahun 1997, negara-negara ekonomi Asia Timur yakni Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Hongkong, Singapura, Malaysia, Thailand dan Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkelanjutan sehingga mampu menurunkan tingkat kemiskinan secara signifikan. Kedelapan negara-negara ini sejak tahun 1960 mengalami laju pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari negara-negara berkembang lainnya, bahkan negara-negara maju sekalipun. Atas kesuksesan pembangunan kedelapan negara Asia Timur, Bank Dunia menyebutnya sebagai keajaiban Asia (*the East Asia Miracle*).

Walaupun terdapat dua aliran pemikiran yang berbeda dalam menjelaskan sebab-sebab terjadinya keajaiban tersebut, namun kedua arus pemikiran ini sepakat bahwa keajaiban Asia Timur terjadi karena kebijakan perdagangan yang berorientasi ekspor.¹⁶ Aliran yang pertama berasal dari pemikiran Neoklasik salah satu tokohnya adalah Jagdish Bhagwati. Keajaiban Asia Timur terjadi karena tingginya laju pertumbuhan investasi swasta akibat dari kebijakan industrialisasi yang lebih berorientasi ekspor (*export promoting*) daripada strategi substitusi impor (*import substitution*). Peningkatan penerimaan ekspor ini berakibat pada tingginya kegiatan investasi swasta yang diikuti oleh peningkatan impor peralatan modal mutakhir dalam rangka mewujudkan kemajuan teknologi yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dalam periode waktu yang panjang. Di saat yang bersamaan dan sekaligus mendukung kemajuan teknologi juga terjadi investasi yang cukup dalam sumberdaya manusia.

Arus pemikiran lain yakni dari ekonomi strukturalis berpendapat bahwa keajaiban Asia Timur ini terjadi karena peran aktif pemerintah di dalam mendukung strategi industrialisasi berorientasi ekspor. Keberhasilan intervensi pemerintah disebabkan adanya asas timbal balik di

¹⁴. Joseph E. Stiglitz. *The Insider* (2000). <http://www.imf.org/>

¹⁵. op.cit. Joseph E. Stiglitz. (2002) hal 13

¹⁶. Thee Kian Wie (2003). *Kebijakan Industri di Ekonomi-Ekonomi Ajaib Asia Timur, dalam Indonesia dan Tantangan Global: 75 tahun Suhadi Mangkusuwondo*. Jakarta: CSIS, hal 81. Lihat juga Ari Kuncoro (2003) *Microeconomic Determinants of Economic Growth in East Asia, Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, vol LI, No 1

dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan seperti pemberian subsidi kredit langsung maupun proteksi impor yang cukup tinggi dalam rangka mendorong ekspor. Intervensi aktif pemerintah lebih ditekankan pada upaya melengkapi, mengatur dan menciptakan mekanisme pasar daripada menggantikan peran mekanisme pasar. Selain itu, pemerintah juga menciptakan lingkungan yang kondusif sehingga mekanisme pasar dapat bekerja secara aktif dalam mendorong strategi orientasi ekspor.¹⁷

Negara-negara di kawasan Asia timur ini akhirnya menjadi kawasan yang cukup prospektif (*emerging markets*) sehingga menjadi surga bagi penanaman modal asing baik jangka pendek (*portfolio investment*) dan jangka panjang berupa investasi asing langsung (*foreign direct investment*). Liberalisasi sektor keuangan dan pasar modal tidak bisa dielakkan, padahal sebenarnya tingkat tabungan dalam negeri cukup tinggi sekitar 30 persen. Liberalisasi terjadi karena adanya tekanan internasional, termasuk departemen keuangan AS¹⁸. Akibatnya, modal jangka pendek membanjiri di kawasan Asia Timur ini hanya sekedar mencari keuntungan jangka pendek pula. Mengelembungnya utang swastapun tidak bisa dihindari.

Krisis Asia dan Kegagalan Resep IMF

Kesuksesan negara Asia Timur tiba-tiba berubah 180 derajat menjadi krisis sebuah krisis ekonomi. Krisis di kawasan Asia Timur ini berangkat dari mismanajemen pengelolaan nilai tukar mata uang. Untuk mendukung proses industrialisasi ekspor, negara-negara di kawasan berusaha menstabilkan nilai tukar mata uangnya dengan mengambil kebijakan yang lebih condong ke arah sistem nilai tukar tetap (*fixed exchange rate*). Walaupun mampu

menekan tingkat inflasi pada tingkat yang relatif rendah, namun tingkat inflasi masih relatif tinggi dibandingkan dengan negara-negara maju yang menjadi partner dagangnya menyebabkan mata uang di kawasan ini mengalami *overvalue* dan rawan terhadap tekanan para spekulan. Krisis mata uang akhirnya tidak bisa dihindari, dimulai dari jatuhnya nilai tukar Baht Thailand dan kemudian menjalar ke Won Korea, Ringgit Malaysia dan Rupiah Indonesia. Pada awal tahun 1998, Bath Thailand terdepresiasi sebesar 37,5%, Won Korea sebesar 39% dan Rupiah Indonesia sebesar 73,9%.

Krisis mata uang ini menimbulkan kepanikan di sektor finansial, pelarian modal (*capital flight*) jangka pendek terjadi secara besar-besaran. Krisis ini juga merambat ke sektor bisnis yang selama ini mengandalkan utang luar negeri. Di Thailand, sektor *real estate* pertama kali yang terkena dampaknya karena mengandalkan pada modal asing jangka pendek. Depresiasi nilai tukar won di Korea selatan secara cepat menjalar ke perusahaan-perusahaan besar milik para konglomerat Chaebol seperti Hanbo, Sammi, Samsung, Dae Woo Lucky Gold Star dan KIA. Krisis rupiah di Indonesia juga berdampak pada perusahaan-perusahaan besar yang mengandalkan pada utang luar negeri. Dampak selanjutnya bisa diduga, krisis kemudian merembet ke sektor perbankan dan finansial di ketiga negara ini. Krisis ekonomi yang lebih parah akhirnya tidak bisa dihindari.

Bahkan krisis ini juga menjalar ke negara lain mulai dari Rusia sampai negara-negara di kawasan Amerika Latin. Inilah krisis ekonomi dunia terbesar kedua setelah *great depression*. Sebagai negara anggota

¹⁷ Ibid, Thee Kian Wie (2003). hal 85.

¹⁸ ibid. Joseph E. Stiglitz (2000)

IMF, Korea Selatan, Thailand dan Indonesia mengundang IMF untuk mengatasi krisis dan hanya Malaysia tidak mengundang IMF. IMF memberi respon dengan mengucurkan dana (*bailout*) sebesar 95 milyar dollar AS dengan perincian Korea Selatan 55 miliar dollar AS, Indonesia 33 miliar dollar AS dan Thailand 17 miliar dollar AS. Kucuran dana ini diharapkan mampu mengatasi gejala nilai tukar. Disamping itu, dengan dana ini diharapkan negara mampu menyediakan dollar bagi swasta untuk membayar utang mereka yang jatuh tempo.

Masuknya IMF memaksa ketiga negara ini melakukan tindakan drastis sesuai dengan tiga pilar Konsensus Washington. Tindakan drastis di Thailand berupa: (1) likuidasi 56 lembaga keuangan dan membentuk lembaga yang bertugas menjual perusahaan-perusahaan lokal yang mengalami krisis keuangan (2) mobilisasi dana oleh pemerintah dalam rangka restrukturisasi hutang dan rekapitalisasi (3) memperkuat sektor perbankan dengan cara memberlakukan aturan ketat dalam pemberian kredit.¹⁹

Program stabilisasi ekonomi Korea antara lain : (1) likuidasi terhadap 10 perbankan untuk menciptakan stabilisasi sektor perbankan dan moneter; (2) penyusunan paket rehabilitasi yang terdiri dari paket rekapitalisasi, pembenahan institusi, perbaikan sistem manajemen dan lain-lain; (3) mempermudah aturan main dalam kepemilikan bank agar bisa mengundang investor asing; (4) pembentukan lembaga otonom untuk mempercepat proses restrukturisasi perusahaan yang tidak efisien melalui proses merger, akuisisi maupun likuidasi.²⁰

Paket pemulihan ekonomi ala IMF di Indonesia yang tertuang dalam *Letter of Intent*s pun hampir sama antara lain meliputi: (1) kebijakan moneter super ketat yakni

dengan menaikkan suku bunga, baik suku bunga antarbank ataupun suku bunga deposito; (2) kebijakan yang pertama ini diikuti oleh pembenahan bank melalui proses likuidasi dan restrukturisasi perbankan dan sektor finansial untuk menciptakan *sound banking and financial institutions* dan kestabilan sistem moneter (3) kebijakan fiskal ketat melalui pengurangan subsidi dan restrukturisasi undang-undang perpajakan.²¹

Bailout dana ini sesuatu yang benar untuk menenangkan kepanikan pasar. Namun yang menjadi persoalan adalah keefektifan resep IMF dalam mengatasi krisis Asia Timur. IMF menganggap bahwa krisis Asia Timur serupa dengan krisis ekonomi yang terjadi di Amerika Latin sehingga tiga pilar Konsensus Washington bisa diterapkan. Padahal kasusnya jelas berbeda. Asia Timur tidak pernah mengalami defisit anggaran pemerintah dan juga menjalankan kebijakan moneter ketat (*tight monetary policy*) sehingga tingkat inflasi bisa dikendalikan. Persaolannya bukan pada ketidakhati-hatian (*imprudent*) pemerintah seperti kasus negara Amerika Latin, tetapi karena ketidakhati-hatian sektor swasta.²² Kebijakan fiskal dan moneter ketat dipaksakan kepada negara sedang berkembang karena diharapkan ada surplus untuk membayar kembali utang. Padahal di negara maju sendiri untuk menghadapi resesi ekonomi selalu dilakukan dengan kebijakan ekspansi fiskal dan moneter

¹⁹. Bob Sugeng Hadiwinata (2002). Politik Bisnis Internasional. Yogyakarta: Tiara Wacana. Hal 202

²⁰. *ibid*. Bob Sugeng Hadiwinata (2002), hal 203-203.

²¹. Detil paket pemulihan ala IMF tercermin dari *Letter of Intent*s dari I hingga IX

²². *Op.cit*. Stiglitz (2000)

sebagai antisipasi *counter-cyclical* untuk memacu agar ekonomi segera cepat keluar dari krisis.²³

Kebijakan kontraksi fiskal akan menyebabkan ekonomi mengarah ke resesi bahkan depresi. Begitu pula kebijakan moneter ketat dengan cara menaikkan suku bunga justru menyebabkan banyak perusahaan yang bangkrut. Padahal telah diyakini oleh banyak ekonom dan menjadikan resep standar dalam menghadapi penurunan ekonomi. Pemerintah harus menstimulasi ekonomi baik dengan kebijakan fiskal ekspansif maupun kebijakan moneter longgar dengan mengurangi pajak, peningkatan pengeluaran pemerintah maupun penurunan suku bunga.²⁴ Dalam kasus Indonesia, atas saran IMF, segala subsidi harus dicabut. Pengurangan subsidi BBM telah menyebabkan kerusuhan sosial dan politik sehingga kontraproduktif bagi pemulihan ekonomi itu sendiri.

Disamping diagnosis dan resep yang salah, prasyarat yang harus dilakukan terlalu berlebihan. Misalnya pada kasus Indonesia pada Lol pertama yang ditandatangani pada tgl 15 Januari 1998 terdapat 130 syarat yang mencakup berbagai sektor ekonomi. Prasyarat yang berlebihan justru menyebabkan program IMG kurang fokus dan tidak ada prioritas penanganan krisis. Kompetensi utama IMF sebenarnya hanya pada bidang makroekonomi dan moneter dan ini ditunjukkan oleh stafnya yang ahli di bidang ini. Tetapi prasyarat dan rekomendasi seringkali keluar dari kompetensinya seperti perbankan, pertanian, *corporate restructuring*, industri dsb.²⁵ Misalnya dalam kasus penyehatan perbankan melalui kebijakan likuidasi justru menciptakan destabilitas sektor perbankan.²⁶ Kegagalan penyehatan perbankan dalam kasus di Asia

Timur tidaklah mengherankan bila berkaca dari kegagalan IMF menyehatkan perbankan di kawasan Amerika Latin. IMF bukan menyelamatkan perbankan tetapi mendorong ke arah kehancuran.

Resep yang kurang pas ini dan banyak diluar kompetensi para stafnya mengakibatkan negara-negara yang menjadi pasien IMF di Kawasan Asia Timur ekonominya semakin parah. *Gross Domestic Product* (GDP) di Indonesia pada tahun 1998 mengalami penurunan sebesar 13,1%, Thailand 10,8% dan Korea Selatan 6,7%. Tiga tahun kemudian GDP Indonesia masih 7,5% dibawah kondisi sebelum krisis dan Thailand 2,3%. Pengangguran juga mengalami peningkatan cukup drastis dan peningkatan jumlah orang miskin.²⁷ Sementara itu Malaysia melalui Perdana Menteri Mahathir Muhammad menolak kehadiran IMF. Malaysia tetap melakukan kebijakan ekspansi fiskal dan moneter. Selain itu untuk meredam terus melemahnya Ringgit Malaysia, negara ini melakukan kontrol devisa. Solusi Malaysia ini ternyata lebih ampuh. Penurunan ekonomi di negeri Jiran ini hanya

²³. Rizal Ramli (2002). Malpraktek dan Mitos IMF di Indonesia, Makalah disampaikan dalam seminar bertema *Penyehatan Sektor Keuangan dan Dilema Hutang Indonesia: Mampukah Kita Mencegah Terjadinya Krisis Lanjutan?*. Yogyakarta, 3 Oktober 2002, Universitas Kristen Duta Wacana.

²⁴. Op.cit. Stiglitz (2002), hal 105

²⁵. Misalnya baru tiga tahun belakang ini IMF mewajibkan stafnya ikut kursus perbankan komersial selama 3 bulan di kantor pusat IMF Washington. ibid Rizal Ramli (2002)

²⁶. likuidasi 16 bank di Indonesia justru menimbulkan kepanikan sektor perbankan sehingga pemerintah terpaksa mengeluarkan kebijakan blankeet quareantee dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

berlangsung dalam jangka pendek dan kembali pulih dengan cepat daripada negara yang menjadi pasien IMF.²⁸

Catatan Akhir

Resep-resep IMF yang dituangkan dalam Konsensus Washington ternyata tidak cukup manjur dalam mengatasi krisis ekonomi di Asia Timur. Banyak kritik akhirnya tertuju kepada lembaga ini. Salah satu kritik keras dari ekonom Anna J. Schwart supaya program *boilout* dana dari IMF dihentikan dan bahkan menyarankan supaya IMF dibubarkan karena lembaga ini tidak demokratis dan kurang bertanggung-

jawab terhadap kebijakan yang telah dilakukan.

Keberadaan IMF yang lebih dari dua tahun menunjukkan bahwa program IMF telah gagal sebagaimana dikemukakan oleh Stiglitz. Walaupun sudah agak terlambat, namun keputusan bangsa ini untuk memutuskan kontrak kerjasama pemulihan ekonomi dengan IMF pada tahun keenam keberadaannya sangatlah tepat. Kegagalan program IMF merupakan pelajaran sangat berharga bagi bangsa ini untuk menyusun paket pemulihan ekonominya sesuai dengan peta masalah yang ada dan platform yang kita inginkan bersama. ●

²⁷ Op.cit. Stiglitz (2002), hal 97.

²⁸ E Kaplan and D. Rodrik (2001), *Did Malaysia Capital Controls Work? Working Paper No. W8142 National Bureau of Economic Research (NBER)*.

Daftar Pustaka

- Arif, Sritua. 2001. *IMF/Bank Dunia dan Indonesia*. Surakarta: Muhammadiyah University Press Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Basalim, Umar dkk. 2000. *Perekonomian Indonesia: Krisis dan strategi Alternatif*. Jakarta: UNAS – CIDESINDO.
- Baswir, Revrisond. 2003. *Dibawah Ancaman IMF*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- E Kaplan and D. Rodrik. 2001. *“Did Malaysia Capital Controls Work?” Working Paper No. W8142 National Bureau of Economic Research (NBER)*.
- Hadiwinata, Bob. Sugeng. 2002. *Politik Bisnis Internasional*. Yogyakarta: Kanisius.
- <http://www.imf.org/>
- <http://www.imfsite.org/>

Topik: Indonesia keluar dari IMF

<http://www.foreign-policy-infocus.org/>

Economic Research (NBER).

Kuncoro, Ari . 2003. "Microeconomic Determinants of Economic Growth in East Asia", *Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, Vol. LI, No 1, hal 1-52

Sidell R., Schott. Brief History of Fund Conditionality. <http://www.imf.org/>

Arthur MacEwan. 2001. The IMF and Argentina's Spiraling Crisis. <http://www.foreign-policy-infocus.org/>

Stiglitz, E. Joseph. 1998. "The Asian Crisis and the Future of the International Architecture". <http://www.worldbank.org/>

.....2000. The Insider
<http://www.imf.org/>

Ramli, Rizal. 2002. "Malpraktek dan Mitos IMF di Indonesia", Makalah disampaikan dalam seminar bertema *Penyehatan Sektor Keuangan dan Dilema Hutang Indonesia: Mampukah Kita Mencegah Terjadinya Krisis Lanjutan?*. Yogyakarta, 3 Oktober 2002, Universitas Kristen Duta Wacana.

.....2003. *Globalization and Its Discontents*. New York: W.W. Norton and Company.

Roth, P. Timothy. 2001. "Recent Bailouts and Reform of the International Monetary Fund", *Joint Economic Committee*, United States Congress, July.

Subago, Agus. 2003. *Restrukturisasi Ekonomi dan Birokrasi: Kebijakan atas Krisis dalam Tinjauan Sistem Moneter Internasional*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.

Sadaharu Kataoka. 1999. "The Plight of African States and Good Government", *the Japan Institute of International Affairs*.

T. Lane, A. Ghosh, J. Hammanm, S. Phillips, M. Shulze-Ghattas, and T. Tsikata. 1999. "IMF-Supported Programs in Indonesia, Korea and Thailand: A Preliminary Assesment," Occasional Paper 178, *International Monetary Fund*, January.

Sachs, D. Jeffrey. <http://www.imf.org/>

Wie, Kian Thee. 2003. "Kebijakan Industri di Ekonomi-Ekonomi Ajaib Asia Timur", dalam *Indonesia dan Tantangan Global: 75 tahun Suhadi Mangkusuwondo*. Jakarta: CSIS, hal 81.

Schwartz, J., Anna. 1998. "Time to Terminate The ESF and The IMF", Working Paper No. 48. *National Bureau of*

